BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era 4.0 saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan percepatan informasi, seluruh aspek dalam perusahaan sangatlah diperlukan. Perusahaan mulai mengalihkan fokusnya tidak hanya pada memaksimalkan keuntungan, namun juga pada keberlanjutan bisnisnya. Alhasil, segala tindakan yang dilakukan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, membuat masyarakat sekitar ikut merespon. Di masa depan, lingkungan yang efisien akan menjadi persyaratan atau isu penting bagi tanggung jawab perusahaan.

Pencemaran lingkungan hidup yang mengancam makhluk hidup selama hidupnya berdampak pada kurangnya perhatian dan kesadaran dalam kegiatan operasional perusahaan. Semua pihak seperti pemerintah, pemegang saham, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memahami dan semakin menyadari bahwa pencapaian tujuan meminimalkan keuntungan berdampak terhadap masyarakat umum dan lingkungan (Iriyanto dan Nugroho, 2014).

Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari tema strategis yang telah dicanangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sumber daya alam (SDA) jumlahnya terbatas dan tidak dikelola semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun diperlukan mekanisme untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat melalui penggunaan sumber daya alam dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Disemadi & Prananingtyas, 2020). Untuk meningkatkan penciptaan nilai, pemerintah, sebagai

lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, harus mendorong sektor swasta dan dunia usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui profitabilitas, pelestarian lingkungan, dan sinergi keuntungan mereka izin untuk mengelola. Sinergi dari aspek-aspek tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan melalui penerapan kebijakan yang disebut program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pemerintah Indonesia menekankan bahwa perusahaan pengelola sumber daya alam harus melaksanakan CSR untuk berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kajian tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN KEP-236/MBU/2003 dan selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, teguran tertulis, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan kegiatan usaha adalah sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR (UU Nurjana & Yurianti, 2019).

Ketika masyarakat merasa bahwa perusahaan tidak secara langsung mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sosial, maka timbullah resistensi dalam bentuk keresahan sosial (Marthin et al., 2017). Oleh karena itu, melaksanakan program CSR merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua perusahaan, termasuk yang bergerak di bidang infrastruktur, khususnya sektor konstruksi.

Industri manufaktur Indonesia saat ini menghadapi persaingan dan tantangan yang sangat ketat, terutama dalam kemampuan menciptakan produk baru yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam menghasilkan uang dan mempengaruhi pikiran konsumen. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk menang. Keunggulan relatif sebagai indikator keberhasilan bukan lagi menjadi tulang punggung kemenangan dalam pertarungan yang memerlukan intensitas dan konsentrasi tinggi. Di era ekonomi kreatif saat ini, kunci untuk memenangkan persaingan adalah inovasi dan desain (Ärinädal, 2006). Inovasi dalam pengembangan produk dan layanan baru merupakan kunci kelangsungan hidup perusahaan besar, dan di satu sisi selalu diimbangi oleh pengetahuan dan proses penambahan pengetahuan..

Pengungkapan CSR dilakukan dalam sebuah dokumen yang disebut laporan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan merupakan suatu bentuk informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja karyawannya dan juga mencakup kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial (Sari et al., 2017). Melalui laporan keberlanjutan ini, cakupan tanggung jawab sosial perusahaan dapat ditentukan dan menarik perhatian bisnis global (Suharyani et al, 2019).

Pembuatan laporan keberlanjutan saat ini didasarkan pada standar Inisiatif Pelaporan Global (GRI), yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi yang menangani masalah pelaporan lingkungan. Standar GRI tersebut diterapkan pada tahun 2016 dan telah mengalami penyesuaian. Saat ini standar tersebut terdiri dari dua aspek standar umum dengan 62 indikator dan dua aspek standar khusus dengan 89 indikator. Kriteria spesifiknya antara lain indikator pengungkapan CSR yang dibagi menjadi tiga kategori

kinerja: kinerja ekonomi (kode 200), kinerja lingkungan (kode 300), dan kinerja sosial (kode 400).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Kuswanto (2019) mengenai pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan perusahaan juga dilakukan dengan judul “Analisis program CSR dalam laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI (studi empiris pada perusahaan industri konstruksi).” Penekanannya adalah pada pengungkapan indikator kinerja. Studi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dan Timah (Persero) Tbk menemukan bahwa indikator kinerja disampaikan dengan rata-rata pengungkapan di atas 75% berdasarkan GRI-3.1 (Sari, 2014). Survei terhadap 29 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap indikator kinerja berdasarkan GRI-G4 masih rendah, terbukti dengan tidak adanya indikator pengungkapan.

Penelitian ini akan dilakukan pada PT Sat Nusapersada Tbk, karena perusahaan tersebut berkomitmen untuk kinerja lingkungan yang berkelanjutan pada tahun 2022 dengan menerapkan operasi kantor ramah lingkungan. Perusahaan mengakui pentingnya mengurangi dampak lingkungan dan menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Untuk mencapai tujuan ini, Perusahaan terus mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengurangi penggunaan kertas, energi listrik, bahan bakar minyak, dan air. Pada tahun 2022, Perusahaan bertujuan untuk lebih mengurangi penggunaan kertas dari angka tahun lalu sebesar 3.149 rim menjadi 2.115 rim pada tahun 2022 dan menerapkan tindakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dari angka tahun lalu. Perusahaan juga mengelola emisi, limbah, dan air limbah sesuai dengan

peraturan yang berlaku untuk meminimalkan dampak pada lingkungan. Sebagai hasil dari upaya tersebut, Perusahaan tidak menerima keluhan atau sanksi lingkungan pada tahun 2022 (sustainability PT. Sat Nusapersada Tbk. 2022).

Dari latar belakang yang telah disampikan diatas maka peneliti mengambil judul ” Analisis Program *Corporate social responsibility* Dalam *Sustainability Report* Berdasarkan GRI 400 *Standards* Pada Perusahaan PT Sat Nusapersada Tbk”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada peneltian ini adalah : ” Bagaimana program CSR (*corporate social responsibility*) dalam *sustainability report* berdasarkan GRI 400 *standards* pada perusahaan PT Sat Nusapersada Tbk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar program CSR (*corporate social responsibility*) berdasarkan GRI 400 *standards* pada perusahaan PT Sat Nusapersada Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua keunggulan yaitu keunggulan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada judul skripsi Analisis Program CSR (*corporate social responsibility*) Dalam *Sustainability Report* Berdasarkan GRI 400 *Standards* Pada

Perusahaan PT Sat Nusapersada Tbk menjadi rujukan dalam mata kuliah *Good Corporate Governance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat bagi Perusahaan adalah meningkatnya reputasi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan kepercayaan bagi investor untuk pengembangan bisnis. kemudian dapat memberikan saran kepada emiten di Indonesia berdasarkan hasil survei, yang akan digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.